

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL
TAHUN 2017-2019**



TUGAS AKHIR

OLEH :

LILIS SETIYAWATI

NIM 18030030

**PROGRAM STUDI DIII AKUNTANSI
POLITEKNIK HARAPAN BERSAMA**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

Tugas Akhir yang berjudul :

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL TAHUN
2017-2019

Oleh mahasiswa :

Nama : Lilis Setiyawati

NIM : 18030030

Telah diperiksa dan dikoreksi dengan baik dan cermat. Karena itu pembimbing
menyetujui mahasiswa tersebut untuk menempuh ujian tugas akhir :

Tegal, 23 Juni 2021

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Asrofi Langgeng N., S.Pd., M.Si., CTT
NIPY. 04.015.210

Hikmatul Maulidah, S.Pd., M. Ak., CAAT
NIPY. 02.019.403

LEMBAR PENGESAHAN

Tugas Akhir yang berjudul :

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL
TAHUN 2017-2019**

Oleh :

Nama : Lilis Setiyawati

NIM : 18030030

Program Studi : Akuntansi

Jenjang : Diploma III

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Tugas Akhir
Program Studi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Tegal.

Tegal, 9 Juli 2021

1. Asrofi Langgeng N., S.Pd., M.Si., CTT.

Ketua Penguji



2. Ririh Sri Harjanti, SE., MM.

Penguji 1



3. Fitri Amaliyah, SE., M.Ak.

Penguji 2



Mengetahui,
Ketua Program Studi,



Yeni Priatna Sari, SE., M.Si., Ak., CA

NIPY. 03.013.142

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TA

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis saya dalam bentuk Tugas Akhir ini yang berjudul “ ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL TAHUN 2017-2019 ”, beserta isinya adalah benar karya saya sendiri.

Dalam penulisan Tugas Akhir ini saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan sebagaimana semestinya.

Demikian pernyataan ini untuk dapat dijadikan pedoman bagi yang berkepentingan, dan saya siap menanggung segala resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dan karya tulis saya ini, atau adanya klaim terhadap keaslian karya tulis saya ini.

Tegal, 23 Juni 2021

Yang membuat pernyataan,



LILIS SETIYAWATI

NIM. 18030030

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA
ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai mahasiswa Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama, yang bertandatangan di bawah ini, saya :

Nama : LILIS SETIYAWATI

NIM : 18030030

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Tegal Tahun 2017-2019.

Dengan Hak Bebas Royalti non eksklusif ini Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama berhak menyimpan, mengalih-mediakan/formatkan mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya ke internet atau media lain untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta ijin dari saya selama mencantumkan saya sebagai penulis/pencipta.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebenarnya.

Tegal, 23 Juni 2021

Yang membuat pernyataan,



LILIS SETIYAWATI
NIM.18030030

HALAMAN MOTTO

I don't care for the state of my sad or happy because I don't know which of them is better for me. (Lilis)

“Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman.” (Q.S Ali Imran Ayat 139)

“ Kesuksesan bukan tentang seberapa banyak uang yang kamu hasilkan, tapi seberapa besar kamu bisa membawa perubahan untuk hidup orang lain. ”
(Michelle Obama)

“ Your efforts will never betray you. All your efforts will pay of.”(Taeyong Lee)

" Jangan menjelaskan dirimu kepada siapapun, karena yang menyukaimu tidak butuh itu. Dan yang membencimu tidak percaya itu. " (Ali bin Abi Thalib)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tugas Akhir ini dipersembahkan untuk :

- ♥ Allah SWT yang telah memberikan kemudahan disetiap kesulitan untuk menyusun Tugas Akhir ini.
- ♥ Keluarga besar dan istimewa untuk Orangtua & adikku tercinta (Mama Taryuni, Bapak Tarudin & adik kecilku Anjeli). Terimakasih atas semua keikhlasan, kesabaran, dan ketulusan dalam membantuku baik secara motivasi, material, dan do'a.
- ♥ Sahabatku team Berkah Ilahi (Ratih, Fitri, Diana, dan Izzatul) yang selalu memberikan dukungan menyelesaikan Tugas Akhir dan meyakinkan akan sukses dan lulus bersama.
- ♥ Untuk semua member NCT terutama Johnny Suh. Terimakasih sudah menemani dan memberikan semangat melalui karyanya, sehingga saya mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini.
- ♥ Teman-temanku kelas 6A.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir dengan judul “ Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Tegal Tahun 2017-2019 ”.

Tugas Akhir ini diajukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama.

Penulis menyadari akan keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki, dalam penyusunan Tugas Akhir ini banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat :

1. Bapak Nizar Suhendra, SE., MPP, selaku Direktur Politeknik Harapan Bersama.
2. Ibu Yeni Priatna Sari, SE, M.Si., Ak., CA, selaku Ka.Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama.
3. Bapak Asrofi Langgeng N., S.Pd., M.Si., CTT, sebagai Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan, dan petunjuk hingga terselesaikannya penyusunan Tugas Akhir ini.
4. Ibu Hikmatul Maulidah, S.Pd., M.Ak., CAAT, sebagai Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan, dan petunjuk hingga terselesaikannya penyusunan Tugas Akhir ini.
5. Teman-teman baik di kampus, yang telah memberikan dorongan dan semangat serta semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, turut membantu selesainya Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini jauh dari sempurna, masih banyak kekurangan dan kelemahan disana-sini. Oleh karena itu, penulis memohon maaf atas segala kekurangan dan kelemahan yang ada. Akhirnya, penulis sangat berharap Tugas Akhir ini bermanfaat bagi para pembaca serta pemerhati masalah akuntansi pada umumnya.

Tegal, 23 Juni 2021

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Lilis Setiyawati', written in a cursive style.

LILIS SETIYAWATI
NIM.18030030

ABSTRAK

Lilis Setiyawati. 2021. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Tegal Tahun 2017-2019*. Program Studi: Diploma III Akuntansi. Politeknik Harapan Bersama. Pembimbing I: Asrofi Langgeng N., S.Pd., M.Si., CTT; Pembimbing II: Hikmatul Maulidah, S.Pd., M. Ak., CAAT.

Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan pencatatan transaksi akuntansi yang sering digunakan oleh lembaga-lembaga pemerintahan yang ada di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Kota Tegal pada tahun 2017-2019. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi dan studi pustaka. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif. Teknik analisis data dengan menggunakan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Efektivitas PAD, dan Rasio Efisiensi Belanja. Hasil penelitian ini menunjukkan selama tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 analisis Derajat Desentralisasi Fiskal berada dibawah 50 persen yang menandakan cukup baik dengan rata-rata menunjukkan angka sebesar 28,45%. Efektivitas PAD memiliki rata-rata angka sebesar 99,02% menunjukkan bahwa sudah cukup efektif. Efisiensi Belanja menunjukkan bahwa sudah cukup efisien dengan rata-rata menunjukkan angka 88,63%. Kesimpulan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Tegal sudah cukup baik dengan hasil yang menunjukkan tidak kurang atau lebih dari kriteria penilaian.

Kata Kunci : Laporan Keuangan Pemda, desentralisasi fiskal, efektifitas, efisiensi

ABSTRACT

Setiyawati, Lilis. 2021. *The Analysis of Financial Performance Tegal City Government in 2017-2019*. Study Program: Accounting Associate Degree. Politeknik Harapan Bersama. Advisor: Asrofi Langgeng N., S.Pd., M.Si., CTT; Co-Advisor: Hikmatul Maulidah, S.Pd., M. Ak., CAAT.

Local government financial reports are recording accounting transactions that are often used by government institutions in Indonesia. The purpose of this research was to determine the financial performance of the Tegal City Government in 2017-2019. The used data collections were documentation technique and literature study. The method used in this research was quantitative descriptive analysis with measuring the ratio of the degree of fiscal decentralization analysis, analysis of the effectiveness of PAD revenue, and analysis of spending efficiency. The results of this research showed that during 2017 to 2019 the analysis of the degree of fiscal decentralization is below 50 percent, which indicates sufficient with the average showing a figure of 28.45%. Analysis of the effectiveness of PAD has an average number of 99.02% indicating that it is quite effective. Expenditure efficiency analysis shows that it is quite effective with an average of 88.63%. The conclusion is that the financial performance of the Tegal City Government is quite good with results that show no less or more than the assessment criteria.

Key Words : *Local Government Financial Reports, fiscal decentralization, effectiveness, efficiency*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TA.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Batasan Masalah.....	6
1.6 Kerangka berpikir.....	7
1.7 Sistematika Penulisan.....	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Tinjauan atas Pemerintah Daerah.....	11
2.1.1 Pengertian Pemerintah Daerah.....	11
2.1.2 Kewajiban dan Hak Pemerintah Daerah	12
2.1.3 Fungsi Pemerintah Daerah	13
2.2 Tinjauan atas Keuangan Daerah.....	14
2.2.1 Pengertian Keuangan Daerah.....	14
2.2.2 Sistem dan Basis Pencatatan Akuntansi Keuangan Daerah....	15
2.2.3 Komponen Keuangan Pemerintah Daerah	16
2.3 Tinjauan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	17
2.3.1 Pengertian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	17
2.3.2 Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	18
2.3.3 Peranan Laporan keuangan Pemerintah Daerah	20
2.4 Tinjauan atas Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	22
2.4.1 Pengertian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	22
2.4.2 Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	22
2.4.3 Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah ...	24
2.4.4 Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	24
2.5 Tinjauan atas Laporan Realisasi Anggaran.....	26
2.5.1 Pengertian Laporan Realisasi Anggaran	26
2.5.2 Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran.....	26
2.5.3 Tujuan Pelaporan Realisasi Anggaran	27
2.5.4 Manfaat Informasi Realisasi Anggaran.....	27
2.5.5 Elemen yang Terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran ...	28
2.5.6 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	29

2.5.7 Belanja.....	30
2.6 Penelitian Terdahulu	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
3.1 Lokasi Penelitian	34
3.2 Waktu Penelitian	34
3.3 Jenis Data	34
3.4 Sumber Data.....	35
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.6 Metode Analisis Data.....	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	39
4.1 Hasil Analisis Data.....	39
4.1.1 Analisis Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal.....	40
4.1.2 Analisis Rasio Efektivitas PAD	41
4.1.3 Analisis Rasio Efisiensi Belanja	41
4.2 Pembahasan.....	43
4.2.1 Analisis Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal.....	43
4.2.2 Analisis Rasio Efektivitas PAD	44
4.2.3 Analisis Rasio Efisiensi Belanja	46
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	49
5.1 Kesimpulan.....	49
5.2 Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA	52
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	54

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1. 1 Perkembangan PAD Kota Tegal Tahun 2017-2019	4
Tabel 2. 1 Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisasi Fiskal.....	23
Tabel 2. 2 Kriteria Efektivitas Keuangan Daerah	23
Tabel 2. 3 Kriteria Penilaian Rasio Efisiensi Belanja	24
Tabel 2. 4 Penelitian Terdahulu	31
Tabel 3. 1 Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisasi Fiskal.....	37
Tabel 3. 2 Kriteria Efektivitas Penerimaan PAD	38
Tabel 3. 3 Kriteria Penilaian Rasio Efisiensi Belanja	38
Tabel 4. 1 Analisis Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal	40
Tabel 4. 2 Analisis Rasio Efektifitas Penerimaan PAD	41
Tabel 4. 3 Analisis Rasio Efisiensi Belanja	42
Tabel 4. 4 Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisasi Fiskal.....	43
Tabel 4. 5 Kriteria Penilaian Efektivitas PAD	44
Tabel 4. 6 Kriteria Penilaian Efisiensi Belanja	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1. 1 Kerangka berpikir.....	8

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
Lampiran 1 APBD dan Realisasi Kota Tegal Tahun 2017	54
Lampiran 2 APBD dan Realisasi Kota Tegal Tahun 2018	56
Lampiran 3 APBD dan Realisasi Kota Tegal Tahun 2019	59
Lampiran 4 Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal.....	62
Lampiran 5 Perhitungan Rasio Efektifitas Penerimaan PAD	63
Lampiran 6 Perhitungan Rasio Efisiensi Belanja.....	64
Lampiran 7 Bimbingan Tugas Akhir Dosen Pembimbing I	65
Lampiran 8 Bimbingan Tugas Akhir Dosen Pembimbing II.....	67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Mewujudkan *Good Governance* merupakan tujuan utama yang ingin diwujudkan bagi pemerintahan. Segala aktivitas yang dilakukan untuk mencapainya sebuah pemerintahan yang baik, harus didukung oleh salah satunya adalah kinerja keuangan yang baik. Selain dibutuhkan untuk mencapai *Good Governance*, kinerja keuangan juga dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara program-program pemerintah dan terealisasinya anggaran yang sudah disusun dalam APBD. Tujuan yang lain dari pemerintah yaitu untuk mencapai efisiensi dan efektivitas, yaitu dua konsep utama untuk mengukur prestasi kinerja (pemerintah).

Pengukuran kinerja merupakan proses untuk mengukur kesesuaian realisasi dengan tujuan ditetapkan. Suatu organisasi pada umumnya diturunkan dari perencanaan strategis, yaitu dimulai dari visi dan misi, falsafah dan kebijakan. Selanjutnya perumusan tujuan, sasaran, penyusunan program dan anggaran serta penetapan tugas dan fungsi harus mengacu pada perencanaan strategis yang sudah ditetapkan (Paramitha *et al.* 2014)^[1].

Anggaran merupakan rencana keuangan masa datang yang sudah direncanakan untuk periode satu tahun mendatang. Tahap penyusunan anggaran dalam pemerintahan merupakan tahap yang sangat penting, karena jika anggaran tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja justru dapat

menggagalkan program-program pemerintah yang sudah disusun sebelumnya. Anggaran organisasi sektor publik mencakup rencana-rencana tentang berapa biaya atas rencana yang sudah dibuat dan berapa biaya yang akan diperoleh untuk mendanai rencana tersebut. Anggaran menjadi masalah rutin disebabkan rendahnya daya serap anggaran, serapan anggaran yang tidak optimal menunjukkan adanya permasalahan dalam pengelolaannya, antara lain lemahnya perencanaan program dan kegiatan. Agar semua program tersebut dapat tercapai maka pemerintah dituntut untuk memiliki kemampuan untuk menganalisis dan mengelola keuangan secara baik, dengan menyusun laporan keuangan pemerintah daerah.

Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan pencatatan transaksi akuntansi yang sering digunakan oleh lembaga-lembaga pemerintahan yang ada di Indonesia. Baik kota maupun kabupaten sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat atas pengelolaan dana publik baik penerimaan maupun realisasi belanja. Penyajian laporan keuangan daerah yang dilakukan oleh pemerintah harus dipenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak menimbulkan kekeliruan saat menyajikan laporan dan dijalankan sebagaimana semestinya. Dalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat berbagai komponen-komponen laporan keuangan yang harus dipenuhi. Salah satu komponen laporan keuangannya adalah laporan realisasi anggaran.

Laporan realisasi anggaran merupakan komponen penting yang mengundang perhatian publik, karena masyarakat berhak tau atas pemerintah, apakah sudah baik dalam pengelolaan anggaran dan realisasinya. Jika sudah tau akan pengelolaan keuangan daerah yang sudah dilihat dari laporan realisasi anggaran, maka masyarakat tidak perlu khawatir lagi bagaimana pemerintah dalam mengelola keuangan dana publik. Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi secara lengkap dan rinci kepada masyarakat yang telah dilaksanakan secara efektif, efisien dan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dari hasil informasi tersebut berisi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan, apakah realisasi sudah digunakan sesuai dengan anggaran atau belum.

Pemerintah Kota Tegal merupakan instansi pemerintahan juga menerapkan mekanisme pencatatan dan pengelolaan keuangan termasuk didalamnya membahas tentang anggaran dan realisasi. Pengelolaan keuangan sangat penting bagi Pemerintah Kota Tegal agar anggaran ditetapkan untuk membiayai program-program yang sudah ditetapkan dapat terealisasi dengan anggaran yang sudah ditetapkan. Semua program ini membutuhkan biaya untuk menunjang berjalannya program tersebut, untuk itu dibutuhkan pengalokasian dana yang benar agar menghasilkan anggaran yang sesuai.

Dilihat dari Laporan Realisasi Anggaran Kota Tegal yang belum sepenuhnya terealisasi dilihat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang

mengalami fluktuasi atau naik turun. Berikut gambaran PAD Kota Tegal Tahun 2017-2019 :

Tabel 1. 1 Perkembangan PAD Kota Tegal Tahun 2017-2019

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi
2017	281.841.490.000	306.830.656.135
2018	298.131.841.000	275.021.448.594
2019	297.677.322.000	285.575.788.984

Sumber: Portal Data APBD DJPK Kementerian Keuangan RI^[2]

Permasalahan yang muncul selanjutnya adalah masalah pengelolaan dan pertanggungjawaban kinerja keuangannya. Pemerintah Kota Tegal selaku yang bertanggungjawab perlu meningkatkan kinerja keuangan dengan memperbaiki pengelolaan keuangannya. Sehingga dapat terus menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas agar dapat mencapai kinerja keuangan yang baik.

Salah satunya adalah realisasi PAD yang tidak sesuai dengan target penerimaan, hal ini bisa disebabkan oleh penurunan atau kenaikan penerimaan PAD yaitu penerimaan pajak daerah, karena lemahnya perencanaan dan kurangnya tujuan serta sasaran yang jelas. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis laporan keuangan LRA untuk mengetahui tingkat kinerja keuangan Pemerintah Kota Tegal tersebut.

Dari uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL TAHUN 2017-2019.**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kota Tegal Tahun 2017-2019?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Kota Tegal Tahun 2017-2019.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

- a. Mampu menambah pengetahuan dibidang keuangan khususnya akuntansi sektor publik atau akuntansi pemerintahan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.
- b. Sebagai pijakan referensi dan menambah pengetahuan bagi para pembaca atau bahan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan, pemahaman, dan wawasan peneliti dari penelitian yang dilakukan dengan cara

peneliti bisa mengaplikasikan teori-teori yang telah didapatkan selama perkuliahan berlangsung.

b. Bagi Pemerintah Kota Tegal

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna sebagai bahan masukan dan gambaran kepada Pemerintah Kota Tegal dalam menentukan arah dan strategi untuk perbaikan dalam merealisasikan anggaran pada masa yang akan datang.

c. Bagi Politeknik Harapan Bersama

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penambahan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan mengenai kinerja keuangan Pemerintah Kota Tegal, khususnya bagi akuntansi serta menjadi bahan bacaan di perpustakaan dan dapat memberikan referensi bagi mahasiswa lain.

1.5 Batasan Masalah

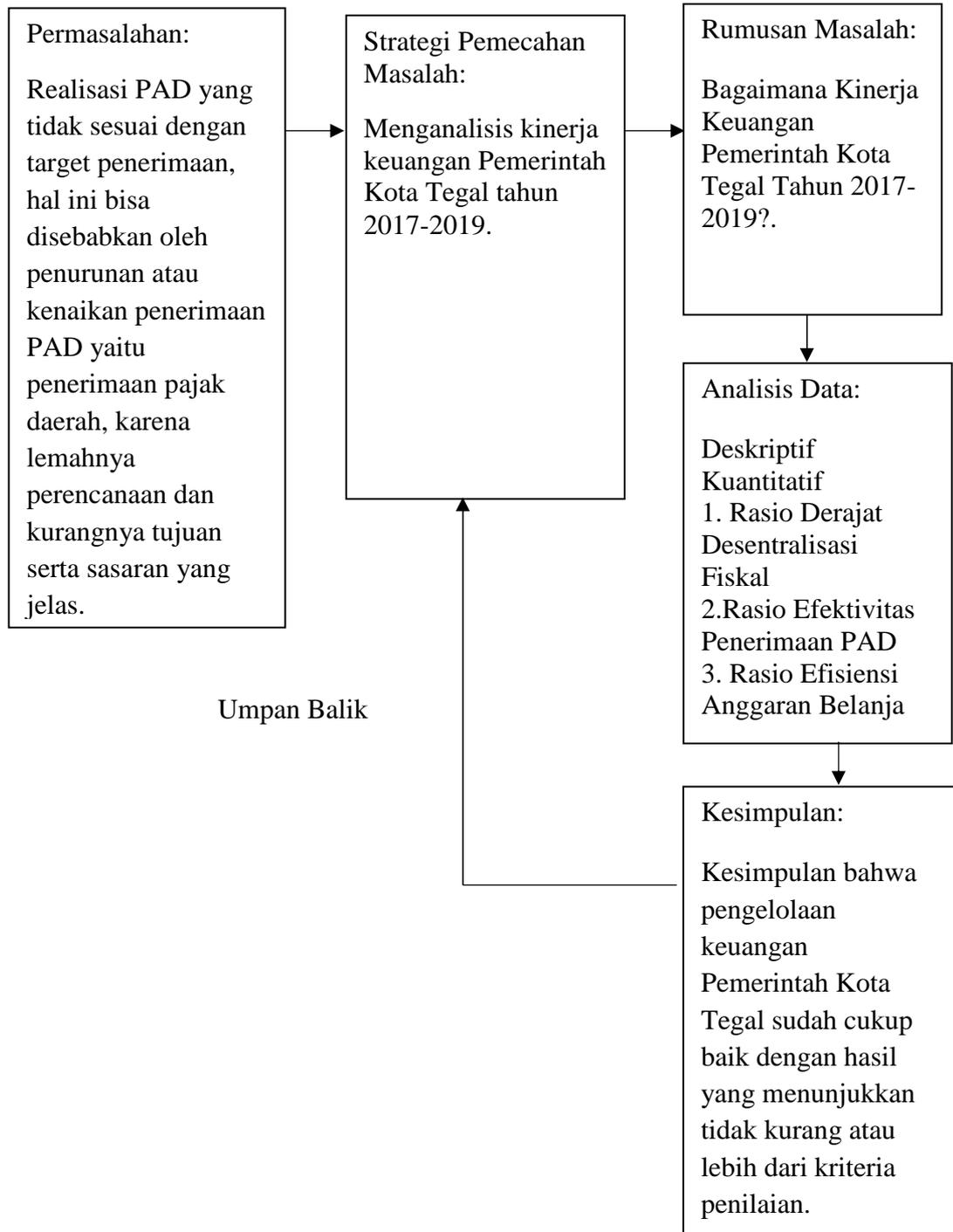
Permasalahan yang akan dibatasi dalam penyusunan penelitian ini yaitu :

1. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Tegal Tahun 2017-2019.
2. Analisis kinerja keuangan dengan menggunakan analisis rasio keuangan yang ditinjau dari aspek keuangan yang meliputi analisis rasio derajat desentralisasi fiskal, analisis rasio efektivitas penerimaan PAD, dan analisis rasio efisiensi anggaran belanja.

1.6 Kerangka berpikir

Kerangka berpikir merupakan suatu rumusan untuk membantu dalam pembuatan penulisan secara keseluruhan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai penelitian yang dilakukan. Laporan realisasi anggaran merupakan komponen penting yang mengundang perhatian publik, karena masyarakat berhak tau atas pemerintah, apakah sudah baik dalam pengelolaan anggaran dan realisasinya. Jika sudah tau akan pengelolaan keuangan daerah yang sudah dilihat dari laporan realisasi anggaran, maka masyarakat tidak perlu khawatir lagi bagaimana pemerintah dalam mengelola keuangan dana publik. Pemerintah Kota Tegal juga menerapkan mekanisme pencatatan dan pengelolaan keuangan termasuk didalamnya membahas tentang anggaran dan realisasi. Namun, dilihat dari Laporan Realisasi Anggaran Kota Tegal yang belum sepenuhnya terealisasi dilihat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mengalami fluktuasi atau naik turun.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dapat dilakukan penyederhanaan menggunakan kerangka berpikir penelitian sebagai berikut:



Gambar 1. 1 Kerangka berpikir

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tugas akhir ini, dibuat sistematika penulisan agar mudah untuk dipahami dan memberikan gambaran secara umum kepada pembaca mengenai tugas akhir ini. Sistematika penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Bagian awal

Bagian awal berisi halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian Tugas Akhir (TA), halaman pernyataan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis, halaman persembahan, halaman motto, kata pengantar, intisari/abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan lampiran. Bagian awal ini berguna untuk memberikan kemudahan kepada pembaca dalam mencari bagian-bagian penting secara cepat.

2. Bagian isi terdiri dari lima bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, kerangka berpikir dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini memuat teori-teori tentang tinjauan atas Pemerintah Daerah, tinjauan atas Keuangan Daerah, tinjauan atas Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah,

tinjauan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dan tinjauan atas Laporan Realisasi Anggaran.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang lokasi penelitian (tempat dan alamat penelitian), waktu penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data penelitian, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan gambaran umum Pemerintah Kota Tegal, laporan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan berisi tentang garis besar dari inti hasil penelitian, serta saran dari peneliti yang diharapkan dapat berguna bagi instansi atau perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka berisi tentang daftar buku, *literature* yang berkaitan dengan penelitian. Lampiran berisi data yang mendukung penelitian tugas akhir secara lengkap.

3. Bagian Akhir

LAMPIRAN

Lampiran berisi informasi tambahan yang mendukung kelengkapan laporan, antara lain Buku Bimbingan Tugas Akhir dan pendukung pengolahan data.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan atas Pemerintah Daerah

2.1.1 Pengertian Pemerintah Daerah

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah^[3] bahwa Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Pemerintah Daerah yang merupakan sub-sistem dari penyelenggaraan pemerintahan nasional memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (Restianda, 2018:33)^[4]. Kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga ini mengandung tiga hal utama didalamnya, yaitu :

1. Pemberian tugas dan wewenang untuk menyelesaikan suatu kewenangan yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah;

2. Pemberian kepercayaan dan wewenang untuk memikirkan, mengambil inisiatif dan menetapkan sendiri cara-cara penyelesaian tugas tersebut;
3. Dalam upaya memikirkan, mengambil inisiatif dan mengambil keputusan tersebut mengikutsertakan masyarakat baik secara langsung maupun DPRD.

2.1.2 Kewajiban dan Hak Pemerintah Daerah

Kewajiban Pemerintah Daerah menurut Pasal 51 Undang-Undang No.23 Tahun 2014^[3] adalah sebagai berikut:

- a. Mengelola sarana dan prasarana pemerintahan;
- b. Mengelola personel, peralatan, dan dokumentasi;
- c. Membentuk perangkat Daerah Persiapan;
- d. Melaksanakan pengisian jabatan aparatur sipil negara pada perangkat Daerah Persiapan;
- e. Mengelola anggaran belanja Daerah Persiapan; dan
- f. Menangani pengaduan masyarakat.

Disamping kewajiban tersebut di atas, daerah juga diberi beberapa hak menurut Undang-Undang No.12 Tahun 2008^[5], yaitu:

- a. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya;
- b. Memilih pemimpin daerah;
- c. Mengelola aparatur daerah;
- d. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah;

- e. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah.
- f. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah; dan
- g. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam perundang-undangan.

2.1.3 Fungsi Pemerintah Daerah

Fungsi Pemerintah Daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah menjalankan, mengatur, dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan. Fungsi Pemerintah Daerah menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2014^[3] adalah:

- a. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan;
- b. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah; dan
- c. Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.

2.2 Tinjauan atas Keuangan Daerah

2.2.1 Pengertian Keuangan Daerah

Keuangan daerah berdasarkan Pasal 1 Poin 5 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah^[6], adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Pengelolaan keuangan daerah adalah tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam mengelola keuangan yang menjadi wewenang tanggung jawab Pemerintah Daerah agar pengelolaan keuangan tersebut memenuhi prinsip ekonomi, efisiensi, dana efektivitas, transparan, dan akuntabel. Siklus pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya terdiri dari 3 (tiga) tahap yaitu (dalam Rahayu, 2016:60)^[7] :

1. Tahap perencanaan
2. Tahap pelaksanaan atau implementasi
3. Tahap pelaporan dan evaluasi kinerja.

Menurut Mahmudi Pada setiap tahap di dalamnya dapat diklasifikasikan lagi apa yang menjadi *input*, proses, dan *output*-nya. Karena ketiga tahap tersebut membentuk suatu siklus, maka *output* yang dihasilkan dari tahap tertentu akan menjadi *input* bagi tahap berikutnya (dalam Rahayu, 2016:60)^[7].

2.2.2 Sistem dan Basis Pencatatan Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Halim (dalam Dien dkk, 2015:536)^[8] Akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi) yang memerlukan.

Sistem pembukuan akuntansi yang telah digunakan selama ini, antara lain (dalam Rahayu, 2016:60)^[7] :

1. Sistem pembukuan tunggal (*single entry*) yaitu pencatatan transaksi hanya pada satu sisi penerimaan atau pada sisi pengeluaran
2. Sistem pembukuan berpasangan (*double entry*) yaitu pencatatan transaksi yang dilakukan secara berpasangan pada sisi debit dan pada sisi kredit.

Menurut Halim, pada dasarnya terdapat empat basis pencatatan akuntansi yang biasa digunakan oleh Pemerintah Daerah, antara lain (dalam Rahayu, 2016:60)^[7] :

1. Akuntansi Basis Kas (*Cash Basis*)

Akuntansi basis kas yaitu pengakuan atau pencatatan transaksi ekonomi hanya dilakukan apabila transaksi tersebut menimbulkan perubahan dalam kas.

2. Akuntansi Basis AkruaI (*Accrual Basis*)

Akuntansi basis akrual yaitu dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi dan bukan hanya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

3. Akuntansi Basis Kas Modifikasian (*Modified Cash Basis*)

Akuntansi basis kas modifikasian yaitu basis yang tepat untuk digunakan dalam mengakuntansikan transaksi keuangan oleh satuan pemegang kas saat ini baik pada satuan kerja maupun pada bagian keuangan atau Biro/Badan Pengelola Kekayaan Daerah karena hampir tidak mungkin suatu Pemerintah Daerah mampu menerapkan basis akrual.

4. Akuntansi Basis AkruaI Modifikasian (*Modified Accrual Basis*)

Akuntansi basis akrual modifikasian yaitu pencatatan akuntansi dengan menggunakan basis kas untuk transaksi-transaksi tertentu dan menggunakan basis akrual untuk sebagian besar transaksi.

2.2.3 Komponen Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan pasal 320 ayat (2) Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah^[3], laporan keuangan paling sedikit meliputi:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

- 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Perubahan SAL);
- 3) Neraca;
- 4) Laporan Operasional (LO);
- 5) Laporan Arus Kas;
- 6) Laporan Perubahan Ekuitas;
- 7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

2.3 Tinjauan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2.3.1 Pengertian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005^[9] tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, bahwa laporan keuangan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Entitas pelaporan dalam pemerintahan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangnya wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Adapun tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah yaitu untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya (dalam Rahayu, 2016:61)^[7]

2.3.2 Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, komponen-komponen yang terdapat dalam suatu laporan keuangan pokok-pokok adalah Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD. (dalam Pangkey dkk, 2017:2850)^[10]

Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (dalam Hartiyani, 2017:11)^[11], mengatakan laporan keuangan pokok pemerintah daerah meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang

dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan.

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

5. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

6. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.

7. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas

pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

2.3.3 Peranan Laporan keuangan Pemerintah Daerah

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah selama satu periode tertentu. LKPD diutamakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi Pemerintah Daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. (dalam Hartiyani, 2017:12)^[11]

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010^[11], Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah

Daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh aset dan ekuitas dana Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antargenerasi (*Intergenerational Equity*)

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengetahui apakah penerimaan Pemerintah Daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

2.4 Tinjauan atas Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

2.4.1 Pengertian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Mahmudi (dalam Pangkey dkk, 2017:2849)^[10] Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas dan kualitas yang terukur, kemampuan daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

2.4.2 Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

1. Derajat Desentralisasi Fiskal

Menurut Mahmudi (2010:142)^[12] Derajat Desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antar jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan Total Penerimaan Daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi.

Kriteria penilaian tingkat desentralisasi fiskal dapat dikategorikan sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisasi Fiskal

Persentase PAD	Tingkat Desentralisasi Fiskal
0,00-10,00	Sangat Kurang
10,01-20,00	Kurang
20,01-30,00	Cukup Baik
30,01-40,00	Sedang
40,01-50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991 dalam (Bisma, 2010:78)^[13]

2. Efektivitas Penerimaan PAD

Pramono (2014:23)^[14] menyatakan bahwa Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah menggambarkan kemampuan daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Secara umum, nilai efektivitas dapat dikategorikan sebagai berikut Mahmudi (dalam Ramadhan, 2018:10)^[15]

Tabel 2. 2 Kriteria Efektivitas Keuangan Daerah

Kriteria Efektivitas	Rasio Efektivitas
Sangat efektif	>100%
Efektif	100%
Cukup efektif	90%-99%
Kurang efektif	75%-89%
Tidak efektif	<75%

Sumber : Mahmudi, 2016 (dalam Ramadhan, dkk, 2018:9)^[15]

3. Efisiensi Belanja Daerah

Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang

dilakukan pemerintah (Mahmudi 2010:166)^[12].

Secara umum kriteria penilaian rasio efisiensi belanja adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 3 Kriteria Penilaian Rasio Efisiensi Belanja

Persentase	Kriteria
Lebih dari 100%	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

Sumber : Dien dkk, 2015^[8]

2.4.3 Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Mardismo (dalam Pangkey, dkk, 2017:2850)^[10] Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan untuk memenuhi 3 (tiga) tujuan yaitu:

- 1) Memperbaiki kinerja pemerintah daerah.
- 2) Membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan.
- 3) Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

2.4.4 Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah menurut Mahsun (dalam Pangkey dkk, 2017:2850)^[10] adalah sebagai berikut:

- 1) Indikator Masukan (Inputs)

Indikator masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.

2) Indikator Proses (*Process*)

Indikator proses adalah merumuskan ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut.

3) Indikator Keluaran (*Output*)

Indikator keluaran adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau nonfisik.

4) Indikator Hasil (*Outcome*)

Indikator hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah.

5) Indikator Manfaat (*Benefit*)

Indikator manfaat adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.

6) Indikator Dampak (*Impact*)

Indikator dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif.

2.5 Tinjauan atas Laporan Realisasi Anggaran

2.5.1 Pengertian Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang berisi tentang informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dari suatu entitas yang dibandingkan dengan anggaran ketiga pos tersebut. Mahsun (dalam Ramadhan, 2018:5)^[15].

Melalui Laporan Realisasi Anggaran menyajikan realisasi dapat diketahui prediksi tentang sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah serta risiko ketidakpastian atas sumber daya ekonomi tersebut (dalam Rahayu, 2016:61)^[7].

2.5.2 Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010^[16], Laporan Realisasi anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut :

1. Pendapatan
2. Belanja
3. Transfer
4. Surplus atau defisit
5. Penerimaan pembiayaan
6. Pengeluaran pembiayaan
7. Pembiayaan neto; dan
8. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)

2.5.3 Tujuan Pelaporan Realisasi Anggaran

Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi dan anggaran entitas pelaporan. Perbandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas)^[17].

2.5.4 Manfaat Informasi Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- b. Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi:

1. Telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat;
2. Telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD); dan
3. Telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(dalam PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas)^[17].

2.5.5 Elemen yang Terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran

Elemen-elemen yang terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran adalah sebagai berikut (dalam Rahayu, 2016:61)^[7] :

- 1) Pendapatan (basis kas) yaitu semua penerimaan kas umum negara/kas daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar lagi oleh pemerintah (basis kas). Sedangkan pendapatan (basis akrual) yaitu hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- 2) Belanja (basis kas) yaitu semua pengeluaran kas umum negara/daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan

diperoleh pembayaran kembali oleh pemerintah. Sedangkan belanja (basis akrual) yaitu kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

- 3) Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan.
- 4) Pembiayaan yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

2.5.6 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan menurut Mursyidi (dalam Ramadhan, 2018:5)^[15] adalah semua permintaan kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan Asli Daerah menurut Pasal 1 Poin 18 Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah^[15] adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Pasal 1 poin 18 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004^[15] PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan perundang-undangan). PAD terdiri atas :

1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang sah

2.5.7 Belanja

Belanja menurut Mursyidi (dalam Ramadhan, 2018:6)^[15] adalah semua pengeluaran kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

a) Belanja Langsung

Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006^[15] belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program-program merupakan penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.

b) Belanja Tidak Langsung

Menurut Perrmendagri Nomor 13 Tahun 2006^[15] belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung dibagi beberapa jenis, yaitu belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.

2.6 Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah rincian dari beberapa penelitian terdahulu yang penulis dapatkan

Tabel 2. 4 Penelitian Terdahulu

NO	NAMA PENELITI (TAHUN) “ JUDUL PENELITIAN “	METODE PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
1	Taufik Hidayat B Tahawa ¹ , Nurhidayah ² , Erwin ³ , Riady Ibnu Khaldun ⁴ (2020) “Analisis Kinerja Keuangan, Desentralisasi Fiskal, Efektivitas dan Efisiensi Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Majene Tahun 2013-2018”.	Metode Deskriptif Kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan selama tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 analisis varian pendapatan sebagian besar telah memenuhi kriteria dimana reliasi pendapatan lebih besar dari yang di anggarkan, analisis derajat desentralisasi fiskal berada di bawah 10 persen yang menandakan masih sangat kurang, analisis tingkat kemandirian daerah pula masih sangat rendah dengan persentase di bawah kriteria 25 persen, analisis varian belanja sebagian besar

			<p>telah memenuhi kriteria dimana reliasi belanja lebih besar dari yang di anggarakan, analisis efektifitas pendapatan asli daerah masih menunjukkan 2 priode hasil yang kurang efektif, namun, efektifitas penerimaan pada Kabupaten Majene sudah cukup efektif dan analisis efisiensi keuangan daerah mayoritas priode masih dibawah kriteria efisien dengan persentasi masih melebihi 90 persen.</p>
2	<p>Anim Rahmayanti (2016) “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013”.</p>	<p>Metode analisis deskriptif kuantitatif</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo masih belum optimal. Walaupun dalam pengelolaan PAD sudah efektif dan efisien, tetapi tingkat kemandirian daerah masih sangat rendah.</p>
3	<p>Paramitha Sandy Mokodompit¹, Sifrid S. Pangemanan², dan Inggriani Elim³ (2014) “Analisis Kinerja keuangan pemerintah Daerah Kota Kotamobagu”.</p>	<p>Deskriptif Kuantitatif, menggunakan metode Rasio Keuangan.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan rasio derajat desentralisasi kinerja keuangannya masih kurang, rasio ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat dan provinsi masih sangat tinggi, begitu juga dengan rasio kemandiriannya masih sangat rendah.</p>
4	<p>Wahyuddin¹, Nora Sugianal² (2017) “Analisis Kinerja</p>	<p>Metode Kuantitatif</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan rasio desentralisasi dapat</p>

	keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe”		dikategorikan sangat kurang, rasio kemandirian daerah masih tergolong sangat rendah dan pola hubungannya termasuk dalam pola hubungan instruktif, rasio efektivitas PAD tidak efektif, rasio efisiensi daerah kurang efisien, dan rasio keserasioan belum stabil dari tahun ketahun.
5	Fikry Nugraha Ramadhan (2018) “Analisis Kemandirian, Efektivitas, dan Pertumbuhan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Provinsi Sulawesi Barat”.	Metode Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Barat dari segi Kemandirian masih rendah sekali dengan pola hubungan Instruktif karena memiliki tingkat rasio rata-rata 19,65%, sedangkan dari segi Efektivitas dinilai sudah cukup efektif karena memiliki tingkat rasio rata-rata sebesar 96,84%, dan dari segi Pertumbuhan juga sudah positif karena memiliki tingkat rasio rata-rata sebesar 13,87%.

Sumber : Penelitian Terdahulu, 2021

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kota Tegal yang beralamat di Jl. Ki Gede Sebayu No. 12 Kota Tegal.

3.2 Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan selama 5 bulan, terhitung dari tanggal 10 Februari sampai dengan 30 Juni 2021.

3.3 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Data Kualitatif

Data Kualitatif menurut Sulistyو (2012)^[18] yaitu data yang tidak dinyatakan dalam bentuk angka, melainkan dinyatakan dalam bentuk data, kalimat, gambar atau bagan. Data kualitatif dalam penelitian ini berupa informasi tertulis terkait Pemerintah Daerah Kota Tegal.

2. Data Kuantitatif

Data Kuantitatif menurut Sulistyو (2012)^[18] yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk angka sesuai dengan bentuknya, data kuantitatif dapat dianalisis menggunakan teknik perhitungan matematika atau statistika. Data Kuantitatif dalam penelitian ini berupa data Laporan Realisasi Anggaran dan data APBD Pemerintah Kota Tegal tahun anggaran 2017-2019.

3.4 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Menurut Sugiyono (2015:308)^[19], Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung yang memberikan data kepada pengumpul data, misalnya orang lain atau dokumen. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini seperti data yang telah ada di pemerintahan data sekunder yang penulis kumpulkan dari pihak internal Pemerintah Kota Tegal melalui website resmi Kota Tegal dan data yang dipublikasikan DJPK Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Laporan keuangan pemerintah berupa Laporan Realisasi anggaran dan Belanja Daerah dan Portal Data APBD.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data atau keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan penulis ialah sebagai berikut :

1. Teknik Dokumentasi

Teknik Dokumentasi menurut Sugiyono (2015:329)^[19] adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Laporan Realisasi Anggaran dan Profil Pemerintah Kota Tegal.

2. Studi Pustaka

Studi Pustaka menurut Sugiyono (2015:140)^[19] merupakan studi kepustakaan yang berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur ilmiah. Studi pustaka dalam penelitian ini yaitu mengumpulkan data dengan cara membaca literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian terdahulu yang dapat digunakan sebagai landasan dalam melakukan analisis.

3.6 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif. Analisis deskriptif kuantitatif yang digunakan yaitu dengan menghitung rasio keuangan berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Tegal Tahun Anggaran 2017-2019 sebagai berikut :

1. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Menurut Mahmudi (2010:142)^[12] Derajat Desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antar jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan Total Penerimaan Daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Rasio derajat desentralisasi dapat dihitung dengan rumus berikut :

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Sumber: Mahmudi, 2010 (dalam Paramitha dkk 2014)^[1]

Kriteria penilaian tingkat desentralisasi fiskal dapat dikategorikan sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisasi Fiskal

Persentase PAD	Tingkat Desentralisasi Fiskal
0,00-10,00	Sangat Kurang
10,01-20,00	Kurang
20,01-30,00	Cukup Baik
30,01-40,00	Sedang
40,01-50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991 dalam (Bisma, 2010:78)^[13]

2. Rasio Efektivitas Penerimaan PAD

Pramono (2014:23)^[14] menyatakan bahwa Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah menggambarkan kemampuan daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Rasio efektivitas PAD dapat dihitung dengan rumus berikut

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Sumber: Mahmudi, 2016 (dalam Ramadhan dkk, 2018)^[15]

Secara umum, nilai efektivitas dapat dikategorikan sebagai berikut

Mahmudi (dalam Ramadhan, 2018:10)^[15]

Tabel 3. 2 Kriteria Efektivitas Penerimaan PAD

Kriteria Efektivitas	Rasio Efektivitas
Sangat efektif	>100%
Efektif	100%
Cukup efektif	90%-99%
Kurang efektif	75%-89%
Tidak efektif	<75%

Sumber : Mahmudi, 2016 (dalam Ramadhan dkk, 2018:9)^[15]

3. Rasio Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah (Mahmudi 2010:166)^[12]. Rasio efisiensi belanja dapat dihitung dengan rumus berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Sumber: Mahsun, 2013 (dalam Dien dkk, 2015)^[8]

Secara umum kriteria penilaian rasio efisiensi belanja adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 3 Kriteria Penilaian Rasio Efisiensi Belanja

Persentase	Kriteria
Lebih dari 100%	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

Sumber : Dien dkk, 2015^[8]

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Pemerintah Kota Tegal

Kota Tegal adalah sebuah Kota di Provinsi Jawa Tengah. Kota Tegal berada di Wilayah pantai utara, dari peta orientasi Provinsi Jawa Tengah berada di Wilayah Barat, dengan bentang terjauh utara ke Selatan 6,7 Km dan Barat ke Timur 9,7 Km. Dilihat dari Letak Geografis, Posisi Kota Tegal sangat strategis sebagai Penghubung jalur perekonomian lintas nasional dan regional di wilayah Pantai Utara Jawa (Pantura) yaitu dari barat ke timur (Jakarta-Tegal-Semarang-Surabaya) dengan wilayah tengah dan selatan Pulau jawa (Jakarta-Tegal-Purwokerto-Yogyakarta-Surabaya) dan sebaliknya.

Luas Wilayah Kota Tegal, relatif kecil yaitu hanya 0,11 % dari luas Provinsi Jawa Tengah. Secara Administrasi Wilayah Kota Tegal terbagi dalam 4 Kecamatan dan 27 Kelurahan. Dengan batas administratif sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah Timur dan Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tegal dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Brebes.

4.2 Hasil Analisis Data

4.2.1 Analisis Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat Desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antar jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan Total Penerimaan Daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi.

Hasil perhitungan dari analisis rasio derajat desentralisasi fiskal untuk tahun 2017-2019 dapat lihat tabel di bawah ini :

Tabel 4. 1 Analisis Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Tahun Anggaran	Realisasi PAD	Total Pendapatan Daerah	Persentase (%)
2017	306.830.656.135	1.024.765.938.277	29,94
2018	275.021.448.594	987.244.236.619	27,86
2019	285.575.788.984	1.036.963.763.529	27,54

Sumber : Data Diolah (2021)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rasio derajat desentralisasi fiskal pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 29,94%; tetapi pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 27,86% dan tahun 2019 mengalami penurunan lagi sebesar 27,54%.

4.2.2 Analisis Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah menggambarkan kemampuan daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Hasil perhitungan analisis efektivitas penerimaan PAD untuk tahun 2017-2019 dapat lihat tabel di bawah ini :

Tabel 4. 2 Analisis Rasio Efektifitas Penerimaan PAD

Tahun Anggaran	Realisasi Penerimaan PAD	Target Penerimaan PAD	Persentase (%)
2017	306.830.656.135	281.841.490.000	108,87
2018	275.021.448.594	298.131.841.000	92,25
2019	285.575.788.984	297.677.322.000	95,93

Sumber : Data Diolah (2021)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rasio efektivitas penerimaan PAD pada tahun 2017 sebesar 108,87% tetapi pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 92,25% dan pada tahun 2019 mengalami kenaikan lagi sebesar 3,69% yaitu sebesar 95,93%.

4.2.3 Analisis Rasio Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah.

Hasil perhitungan analisis rasio efisiensi belanja untuk tahun 2017-2019 dapat lihat tabel di bawah ini :

Tabel 4. 3 Analisis Rasio Efisiensi Belanja

Tahun Anggaran	Realisasi Belanja	Anggaran Belanja	Persentase (%)
2017	1.017.223.991.908	1.150.919.453.000	88,38
2018	916.730.788.800	1.089.919.641.000	84,11
2019	1.046.575.212.898	1.120.465.803.000	93,41

Sumber : Data Diolah (2021)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rasio efisiensi belanja mengalami penurunan dari 88,38% di tahun 2017 menjadi 84,11% di tahun 2018. Tetapi pada tahun 2019 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi 93,41%.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Analisis Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Berdasarkan hasil analisis rasio derajat desentralisasi fiskal maka dapat diketahui kinerja keuangan Pemerintah Kota Tegal sebagai berikut :

Tabel 4. 4 Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisasi Fiskal

Tahun Anggaran	Persentase (%)	Kriteria
2017	29,94	Cukup Baik
2018	27,86	Cukup Baik
2019	27,54	Cukup Baik

Sumber : Data Diolah (2021)

Berdasarkan hasil perhitungan analisis rasio derajat desentralisasi fiskal menunjukkan bahwa laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota Tegal secara umum sudah Cukup baik. Karena rata-rata dari tahun 2017 sampai dengan 2019 sebesar 28,45% dimana dalam kriteria penilaian rasio derajat desentralisasi fiskal termasuk dalam rasio antara 20,01% - 30,00% yang dapat dikatakan Cukup. Dilihat dari tahun 2017 persentase rasio derajat desentralisasi fiskal mengalami kenaikan sebesar 29,94% yang dapat dikatakan Cukup baik; tetapi pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 27,86% dikatakan Cukup baik dan tahun 2019 mengalami penurunan lagi sebesar 27,54% dikatakan cukup baik.

Pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat bahwa pertumbuhan total pendapatan daerah secara umum mengalami penurunan, dengan rata-rata persentase hasil perhitungan rasio derajat desentralisasi fiskal yang masih dibawah 50%, yang dapat dikatakan cukup baik. Hal ini disebabkan dari besaran proporsi transfer pemerintah pusat selain dari itu juga disebabkan kemampuan dalam memperoleh penerimaan sumber-sumber pendapatan daerah khususnya pendapatan pajak. Sehingga kewenangan serta tanggung jawab yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah Kota Tegal dalam mengelola sumber daya yang dimiliki masih kurang dan cukup tingkat kemampuan pemerintah dalam penyelenggaraan desentralisasi. karena ditunjukan dengan kontribusi PAD dalam menopang pembangunannya sendiri sudah cukup baik.

4.3.2 Analisis Rasio Efektivitas PAD

Berdasarkan hasil analisis rasio efektivitas PAD maka dapat diketahui kinerja keuangan Pemerintah Kota Tegal sebagai berikut:

Tabel 4. 5 Kriteria Penilaian Efektivitas PAD

Tahun Anggaran	Persentase (%)	Kriteria
2017	108,87	Sangat Efektif
2018	92,25	Cukup Efektif
2019	95,93	Cukup Efektif

Sumber : Data Diolah (2021)

Berdasarkan hasil perhitungan analisis rasio efektivitas PAD menunjukkan bahwa laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota Tegal secara umum sudah Cukup Efektif. Rata-rata penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2017 sampai dengan 2019 sebesar 99,02% dimana dalam rasio antara 90% - 99% yang dapat dikatakan Cukup Efektif. Dilihat dari tahun 2017 persentase rasio efektivitas PAD sebesar 108,87% yang dapat dikatakan sangat efektif; pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 92,25% dikatakan cukup efektif dan pada tahun 2019 mengalami kenaikan lagi sebesar 3,69% yaitu sebesar 95,93% dikatakan cukup efektif.

Pada tahun 2017 penerimaan Pendapatan Asli Daerah sangat besar dengan rasio efektivitas sebesar 108,87% dikatakan sangat efektif. Hal tersebut terjadi karena peningkatan penerimaan pajak daerah dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 penerimaan Pendapatan Asli Daerah turun menjadi 92,25% dikatakan cukup efektif. Hal tersebut terjadi karena penurunan penerimaan dari retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah. Pada tahun 2019 penerimaan Pendapatan Asli Daerah naik kembali menjadi 95,93% dikatakan cukup efektif. Hal tersebut terjadi karena peningkatan penerimaan pajak daerah.

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa perhitungan Rasio Efektivitas PAD Pemerintah Kota Tegal menunjukkan

persentase yang belum stabil karena data yang ada menunjukkan masih mengalami naik turun atau berfluktuasi. Hal tersebut disebabkan oleh faktor realisasi disetiap elemen pendapatan asli daerah yang beragam disetiap tahunnya. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa tingkat Efektivitas PAD Kota Tegal tahun 2017 sudah menunjukkan kriteria Sangat Efektif, sedangkan tahun 2018 dan 2019 menunjukkan kriteria Cukup Efektif dengan persentase kurang dari 100%. Maka dapat disimpulkan secara keseluruhan efektivitas penerimaan PAD Kota Tegal sudah efektif dan sudah mampu dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan dalam satu tahun anggaran.

4.3.3 Analisis Rasio Efisiensi Belanja

Berdasarkan hasil analisis efisiensi belanja maka dapat diketahui kinerja keuangan Pemerintah Kota Tegal sebagai berikut:

Tabel 4. 6 Kriteria Penilaian Efisiensi Belanja

Tahun Anggaran	Persentase (%)	Kriteria
2017	88,38	Cukup Efisien
2018	84,11	Cukup Efisien
2019	93,41	Kurang Efisien

Sumber : Data Diolah (2021)

Berdasarkan hasil perhitungan analisis rasio efisiensi belanja menunjukkan bahwa laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota Tegal secara umum sudah cukup efisien. Rata-rata penggunaan

anggaran belanja dari tahun 2017 sampai dengan 2019 sebesar 88,63% dimana dalam kriteria penilaian rasio efisiensi belanja termasuk dalam rasio antara 80% - 90% yang dapat dikatakan Cukup Efisien. Dari tahun 2017 persentase efisiensi belanja sebesar mengalami penurunan dari 88,38% di tahun 2017 menjadi 84,11% di tahun 2018. Tetapi pada tahun 2019 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi 93,41%.

Pada tahun 2017 penggunaan anggaran belanja mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 88,38% dikatakan cukup efisien. Hal tersebut terjadi karena penurunan penggunaan anggaran belanja bantuan sosial dan belanja modal dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 penggunaan anggaran belanja turun menjadi 84,11% dikatakan cukup efisien. Hal tersebut terjadi karena penurunan penggunaan anggaran belanja bantuan keuangan kepada Prop/Kab/Kota dan Pemdes, belanja langsung, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Pada tahun 2019 penggunaan anggaran belanja naik dan cukup besar dengan rasio efisiensi sebesar 93,41% dikatakan kurang efisien. Hal tersebut terjadi karena peningkatan penggunaan anggaran belanja tidak langsung, belanja pegawai, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan kpd Prop/Kab/Kota dan pemdes, belanja langsung, belanja barang dan jasa serta belanja modal dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan uraian di atas Pemerintah Kota Tegal dapat dinilai sudah cukup berhemat dalam membelanjakan pos-pos belanja yang dibutuhkan. Hal tersebut digambarkan melalui rata-rata penggunaan anggaran belanja dari tahun 2017 sampai dengan 2019 tidak mencapai persentase 90% yang dikategorikan cukup efisien.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis mengenai kinerja dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Pemerintah Kota Tegal pada tahun 2017-2019, maka pada bab terakhir ini diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Rasio derajat desentralisasi fiskal Pemerintah Daerah Kota Tegal dapat dikatakan cukup baik karena dari tahun 2017-2019 rata-ratanya sebesar 28,45%. Sehingga kewenangan serta tanggung jawab yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah Kota Tegal dalam mengelola sumber daya yang dimiliki masih kurang dan cukup tingkat kemampuan pemerintah dalam penyelenggaraan desentralisasi.
2. Efektivitas PAD Pemerintah Kota Tegal juga dikatakan cukup efektif karena dari tahun 2017-2019 rata-rata efektivitasnya sebesar 99,02%. Maka dapat disimpulkan secara keseluruhan efektivitas penerimaan PAD Kota Tegal sudah efektif dan sudah mampu dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan dalam satu tahun anggaran.
3. Untuk rasio efisiensi belanja jika dilihat dari rata-rata bisa dikatakan cukup efektif. Dikarenakan penggunaan anggaran belanja yang tidak terlalu tinggi. Rata-rata penggunaan anggaran belanja tahun anggaran 2017 sampai 2019 sebesar 88,63%.

5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya. Penulis memberikan sedikit saran yang dimaksudkan untuk dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang membutuhkan, adapun saran-saran yang dikemukakan oleh penulis sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Daerah Kota Tegal diharapkan terus meningkatkan kinerja dengan cara mengoptimalkan penyerapan dananya untuk memperbaiki penargetan anggaran agar lebih ditingkatkan dalam penyelenggaraan desentralisasi.
2. Bagi Pemerintah Daerah Kota Tegal diharapkan terus meningkatkan kinerja dengan cara mengoptimalkan penyerapan dananya untuk memperbaiki penargetan anggaran agar lebih ditingkatkan efektivitasnya dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan.
3. Bagi Pemerintah Daerah Kota Tegal diharapkan terus meningkatkan kinerja dengan cara mengoptimalkan dalam penyerapan dananya untuk memperbaiki pengelolaan dalam penggunaan anggaran belanja agar lebih ditingkatkan efisiensinya, karena kinerja yang baik maka efisiensinya semakin meningkat.
4. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian di instansi yang lain dan menambah rasio-rasio yang dapat digunakan dalam menganalisis kinerja keuangan agar dapat memberi gambaran tentang kinerja keuangan yang lebih jelas dan agar dapat meneliti

kinerja keuangan secara lebih komprehensif sehingga dapat menambah pengetahuan ke arah yang positif.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Paramitha S. Mokodompit., S.S. Pangemanan., I. Elim. (2014). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu. *Jurnal EMBA, Volume 2 No.02*.
- [2] DJPK Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). Visualisasi Data APBD. From <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>
- [3] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- [4] Aditia, Restianda. (2018). Pelaksanaan Asas Pembagian Habis Tugas Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bandung: *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Pasundan.
- [5] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah..
- [6] Pemerintah Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta.
- [7] Rahayu, Runik Puji. (2016). Analisis atas Laporan Realisasi Anggaran untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Pamekasan. *Jurnal Manajemen & Kewirausahaan, Volume 1 No.01. Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung. JURNAL EMBA, Volume 3 No.01*.
- [8] A.N.J. Dien., J. Tinangon., S. Walandouw. (2015). Analisis Laporan Realisasi Anggaran untuk Menilai Kinerja Keuangan pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung. *JURNAL EMBA, Volume 3 No.01*.
- [9] Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta.
- [10] Aldy. H. R. Pangkey., Ivonne S. Saerang., Joy E. Tulung. (2017). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2011-2015. *Jurnal EMBA, Volume 5 No.02*.
- [11] Hartiyani, Siti Johanne. (2017). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Palembang.

Skripsi, Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Sektor Publik Politeknik Negeri Sriwijaya.

- [12] Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Jakarta: STIE YKPN.
- [13] Bisma, I Dewa Gde & Susanto, Hery. (2010). Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2007. *Jurnal Ganec Swara Edisi Khusus Vol.4 No. 3*.
- [14] Pramono, J. (2014). Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta). *Jurnal Ilmiah Among Makarti. Vol. 7 No. 13: 83-112..*
- [15] Ramadhan, Fikry Nugraha. (2018). Analisis Kemandirian, Efektivitas, dan Pertumbuhan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Barat. *Skripsi*, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
- [16] Pemerintah Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta.
- [17] Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 02 Tahun 2010 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas.
- [18] Sulistyono, Joko. (2012). *6 Hari Jago SPSS7*. Cakrawala: Yogyakarta.
- [19] Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 APBD dan Realisasi Kota Tegal Tahun 2017

APBD 2017 Kota Tegal Data per 26 Mei 2017 (Anggaran) dan 12 November 2018 (Realisasi)			
Akun	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan	1.028.723.028.000,00	1.024.765.938.277,00	99,62 %
PAD	281.841.490.000,00	306.830.656.135,00	108,87 %
Pajak daerah	53.768.120.000,00	69.042.455.743,00	128,41 %
Retribusi daerah	23.669.670.000,00	19.857.864.056,00	83,90 %
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	3.479.751.000,00	14.707.658.210,00	422,66 %
Lain-lain PAD yang sah	200.923.949.000,00	203.222.678.126,00	101,14 %
Daper	696.611.835.000,00	644.940.136.542,00	92,58 %
Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	36.699.467.000,00	29.186.187.399,00	79,53 %
Dana alokasi umum	490.772.001.000,00	482.150.715.000,00	98,24 %
Dana alokasi khusus	169.140.367.000,00	133.603.234.143,00	78,99 %
Lain-lain pendapatan daerah yang sah	50.269.703.000,00	72.995.145.600,00	145,21 %
Dana bagi hasil pajak dari Propinsi dan Pemda lainnya	49.729.703.000,00	53.574.777.000,00	107,73 %
Dana penyesuaian dan otonomi khusus	540.000.000,00	0,00	0,00 %
Bantuan keuangan dari Propinsi atau Pemda lainnya	0,00	19.420.368.600,00	-
Belanja	1.150.919.453.000,00	1.017.223.991.908,00	88,38 %

Belanja Tidak Langsung	456.971.175.000,00	397.848.380.523,00	87,06 %
Belanja Pegawai	429.949.266.000,00	383.349.873.023,00	89,16 %
Belanja Hibah	23.985.225.000,00	13.563.884.500,00	56,55 %
Belanja Bantuan sosial	350.000.000,00	165.000.000,00	47,14 %
Belanja Bantuan keuangan kpd Prop/Kab/Kota dan Pemdes	686.684.000,00	686.678.600,00	100,00 %
Belanja tidak terduga	2.000.000.000,00	82.944.400,00	4,15 %
Belanja Langsung	693.948.278.000,00	619.375.611.385,00	89,25 %
Belanja Pegawai	38.929.730.000,00	0,00	0,00 %
Belanja Barang dan Jasa	396.826.614.000,00	413.825.973.676,00	104,28 %
Belanja Modal	258.191.934.000,00	205.549.637.709,00	79,61 %
Pembayaan	122.196.425.000,00	99.384.482.029,00	81,33 %
Penerimaan	125.819.113.000,00	112.932.169.729,00	89,76 %
SILPA TA sebelumnya	125.819.113.000,00	112.932.169.729,00	89,76 %
Pengeluaran	3.622.688.000,00	13.547.687.700,00	373,97 %
Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	0,00	9.925.000.000,00	-
Pembayaran Pokok Utang	3.622.688.000,00	3.622.687.700,00	100,00 %

Lampiran 2 APBD dan Realisasi Kota Tegal Tahun 2018

APBD 2018 dan Realisasi APBD 2018 Kota Tegal

Akun	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan	989.073.097.000,00	987.244.236.619,00	99,82 %
PAD	298.131.841.000,00	275.021.448.594,00	92,25 %
Pajak daerah	66.407.133.000,00	83.852.211.209,00	126,27 %
Retribusi daerah	21.368.509.000,00	17.402.002.890,00	81,44 %
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	3.393.987.000,00	3.530.831.162,00	104,03 %
Lain-lain PAD yang sah	206.962.212.000,00	170.236.403.333,00	82,25 %
Daper	640.431.553.000,00	602.567.259.369,00	94,09 %
Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	33.590.225.000,00	25.571.473.848,00	76,13 %
Dana alokasi umum	482.150.715.000,00	482.150.715.000,00	100,00 %
Dana alokasi khusus	124.690.613.000,00	94.845.070.521,00	76,06 %
Lain-lain pendapatan daerah yang sah	50.509.703.000,00	109.655.528.656,00	217,10 %
Hibah	0,00	27.015.013.112,00	-
Dana darurat	0,00	0,00	-
Dana bagi hasil pajak dari Propinsi dan Pemda lainnya	49.729.703.000,00	66.092.844.949,00	132,90 %
Dana penyesuaian dan otonomi khusus	0,00	0,00	-

Bantuan keuangan dari Propinsi atau Pemda lainnya	780.000.000,00	16.547.670.595,00	2.121,50 %
Lain-lain	0,00	0,00	-
Belanja	1.089.919.641.000,00	916.730.788.800,00	84,11 %
Belanja Tidak Langsung	479.544.488.000,00	391.820.150.217,00	81,71 %
Belanja Pegawai	453.099.543.000,00	375.579.236.296,00	82,89 %
Belanja Bunga	0,00	0,00	-
Belanja Subsidi	0,00	0,00	-
Belanja Hibah	23.408.261.000,00	15.282.746.721,00	65,29 %
Belanja Bantuan sosial	350.000.000,00	215.000.000,00	61,43 %
Belanja Bagi hasil kpd Prop/Kab/Kota dan Pemdes	0,00	0,00	-
Belanja Bantuan keuangan kpd Prop/Kab/Kota dan Pemdes	686.684.000,00	650.967.200,00	94,80 %
Belanja tidak terduga	2.000.000.000,00	92.200.000,00	4,61 %
Belanja Langsung	610.375.153.000,00	524.910.638.583,00	86,00 %
Belanja Pegawai	106.962.477.000,00	0,00	0,00 %
Belanja Barang dan Jasa	362.529.458.000,00	411.288.130.607,00	113,45 %
Belanja Modal	140.883.218.000,00	113.622.507.976,00	80,65 %
Pembiayaan	100.846.544.000,00	95.053.126.488,00	94,26 %

Penerimaan	112.166.544.000,00	106.373.126.488,00	94,83 %
SILPA TA sebelumnya	112.166.544.000,00	106.373.126.488,00	94,83 %
Pencairan dana cadangan	0,00	0,00	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	-
Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	0,00	0,00	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	-
Penerimaan piutang daerah	0,00	0,00	-
Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	0,00	0,00	-
Pengeluaran	11.320.000.000,00	11.320.000.000,00	100,00 %
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	-
Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	11.320.000.000,00	11.320.000.000,00	100,00 %
Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	-
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	-
Pembayaran Kegiatan Lanjutan	0,00	0,00	-
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	0,00	0,00	-
Lainnya	0,00	0,00	-

Lampiran 3 APBD dan Realisasi Kota Tegal Tahun 2019

Realisasi APBD 2019 Kota Tegal Realisasi APBD 2019 (per 21 Oktober 2020)			
Akun	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan	1.043.670.057.000,00	1.036.963.763.529,00	99,36 %
PAD	297.677.322.000,00	285.575.788.984,00	95,93 %
Pajak daerah	77.550.464.000,00	89.361.925.371,00	115,23 %
Retribusi daerah	23.700.141.000,00	19.087.354.255,00	80,54 %
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	3.747.587.000,00	8.575.641.316,00	228,83 %
Lain-lain PAD yang sah	192.679.130.000,00	168.550.868.042,00	87,48 %
Daper	664.378.158.000,00	641.682.768.016,00	96,58 %
Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	25.452.966.000,00	18.911.295.500,00	74,30 %
Dana alokasi umum	502.969.026.000,00	502.969.026.000,00	100,00 %
Dana alokasi khusus	135.956.166.000,00	119.802.446.516,00	88,12 %
Lain-lain pendapatan daerah yang sah	81.614.577.000,00	109.705.206.529,00	134,42 %
Hibah	27.259.800.000,00	28.091.568.988,00	103,05 %
Dana darurat	0,00	0,00	-
Dana bagi hasil pajak dari Propinsi dan Pemda lainnya	53.574.777.000,00	59.813.352.605,00	111,64 %
Dana penyesuaian dan otonomi khusus	0,00	0,00	-

Bantuan keuangan dari Propinsi atau Pemda lainnya	780.000.000,00	21.800.284.936,00	2.794,91 %
Lain-lain	0,00	0,00	-
Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	-
Belanja	1.120.465.803.000,00	1.046.575.212.898,00	93,41 %
Belanja Tidak Langsung	445.427.145.000,00	399.681.169.524,00	89,73 %
Belanja Pegawai	429.547.689.000,00	383.397.282.307,00	89,26 %
Belanja Bunga	0,00	0,00	-
Belanja Subsidi	0,00	0,00	-
Belanja Hibah	12.842.772.000,00	12.031.437.350,00	93,68 %
Belanja Bantuan sosial	350.000.000,00	3.581.950.000,00	1.023,41 %
Belanja Bagi hasil kpd Prop/Kab/Kota dan Pemdes	0,00	0,00	-
Belanja Bantuan keuangan kpd Prop/Kab/Kota dan Pemdes	686.684.000,00	670.499.867,00	97,64 %
Belanja tidak terduga	2.000.000.000,00	0,00	0,00 %
Belanja Lainnya	0,00	0,00	-
Belanja Langsung	675.038.658.000,00	646.894.043.374,00	95,83 %
Belanja Pegawai	107.220.501.000,00	179.070.000,00	0,17 %
Belanja Barang dan Jasa	428.223.074.000,00	480.732.058.309,00	112,26 %

Belanja Modal	139.595.083.000,00	165.982.915.065,00	118,90 %
Pembayaan	76.795.746.000,00	153.518.163.968,00	199,90 %
Penerimaan	88.785.746.000,00	165.508.163.968,00	186,41 %
SILPA TA sebelumnya	88.785.746.000,00	165.508.163.968,00	186,41 %
Pencairan dana cadangan	0,00	0,00	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	-
Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	0,00	0,00	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	-
Penerimaan piutang daerah	0,00	0,00	-
Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	0,00	0,00	-
Penerimaan Pembayaan Lainnya	0,00	0,00	-
Pengeluaran	11.990.000.000,00	11.990.000.000,00	100,00 %
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	-
Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	11.990.000.000,00	11.990.000.000,00	100,00 %
Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	-
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	-
Pembayaran Kegiatan Lanjutan	0,00	0,00	-

Lampiran 4 Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Tahun	Realisasi PAD	Total Pendapatan Daerah	Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal	Kriteria
2017	306.830.656.135	1.024.765.938.277	29,94%	Cukup
2018	275.021.448.594	987.244.236.619	27,86%	Cukup
2019	285.575.788.984	1.036.963.763.529	27,54%	Cukup

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2017} &= \frac{306.830.656.135}{1.024.765.938.277} \times 100\% \\ &= 29,94\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2018} &= \frac{275.021.448.594}{987.244.236.619} \times 100\% \\ &= 27,86\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2019} &= \frac{285.575.788.984}{1.036.963.763.529} \times 100\% \\ &= 27,54\% \end{aligned}$$

Lampiran 5 Perhitungan Rasio Efektifitas Penerimaan PAD

Tahun	Realisasi Penerimaan PAD	Target Penerimaan PAD	Rasio Efektifitas PAD	Kriteria
2017	306.830.656.135	281.841.490.000	108,87%	Sangat Efektif
2018	275.021.448.594	298.131.841.000	92,25%	Cukup Efektif
2019	285.575.788.984	297.677.322.000	95,93%	Cukup Efektif

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2017} &= \frac{306.830.656.135}{281.841.490.000} \times 100\% \\ &= 108,87\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2018} &= \frac{275.021.448.594}{298.131.841.000} \times 100\% \\ &= 92,25\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2019} &= \frac{285.575.788.984}{297.677.322.000} \times 100\% \\ &= 95,93\% \end{aligned}$$

Lampiran 6 Perhitungan Rasio Efisiensi Belanja

Tahun	Realisasi Belanja	Anggaran Belanja	Rasio	Kriteria
			Efisiensi Belanja	
2017	1.017.223.991.908	1.150.919.453.000	88,38%	Cukup Efisien
2018	916.730.788.800	1.089.919.641.000	84,11%	Cukup Efisien
2019	1.046.575.212.898	1.120.465.803.000	93,41%	Kurang Efisien

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2017} &= \frac{1.017.223.991.908}{1.150.919.453.000} \times 100\% \\ &= 88,38\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2018} &= \frac{916.730.788.800}{1.089.919.641.000} \times 100\% \\ &= 84,11\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2019} &= \frac{1.046.575.212.898}{1.120.465.803.000} \times 100\% \\ &= 93,41\% \end{aligned}$$

Lampiran 7 Bimbingan Tugas Akhir Dosen Pembimbing I

No	Hari / Tanggal	Substansi / Uraian Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing I
	Selasa 20/4 -2021	<p>BIMBINGAN PROPOSAL 1 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Halaman judul, Pengesahan & daftar isi di bold - Latar belakang perlu ditambahkan karena belum menggambarkan judul yang diangkat - Buat 2 jenis manfaat yaitu teoritis & praktis - Kerangka berpikir belum menguraikan permasalahan secara rinci - Penambahan tinjauan pustaka - tabel penelitian terdahulu diberi kalimat pengantar - Penambahan jenis data yaitu kuantitatif - Teori dokumentasi diberi contoh - Rumus diberi keterangan sumber termasuk kriteria - Jadwal penelitian diberi kalimat pengantar dan keterangan tabel - cek kembali penulisan daftar pustaka <p>BIMBINGAN PROPOSAL ke 2 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penambahan Latar belakang terkait kinerja keuangannya - Paragraf anggaran letaknya sebelum paragraf LFA - Paragraf 6 sebaiknya menggambarkan pemutresgal - Perbaruan kerangka berpikir 	
	Selasa 4/5 -2021	<ul style="list-style-type: none"> - Penambahan Latar belakang terkait kinerja keuangannya - Paragraf anggaran letaknya sebelum paragraf LFA - Paragraf 6 sebaiknya menggambarkan pemutresgal - Perbaruan kerangka berpikir 	

- Catatan :**
1. Harus Selalu Dibawa Saat Bimbingan dengan Dosen Pembimbing
 2. Bimbingan Minimal 12 kali sampai Disetujui Untuk Tugas Akhir (TA)
 3. Dilampirkan Pada Saat Penjilidan Tugas Akhir (TA)

No	Hari / Tanggal	Substansi / Uraian Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing I
	<p>Sabtu 22 / 5 - 2021</p> <p>Selasa 15 / 6 - 2021</p> <p>Senin 21 / 6 - 2021</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Penulisan gambar 1 digit saja - Pada tinjauan pustaka ditambahkan Pengukuran Kinerja Keuangan - Disajikan secara khusus terkait PAP dan anggaran belanja <p>Bimbingan Proposal Ke 2 : Acc Proposal TA</p> <p>Bimbingan TA 1 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perbaikan pada halaman persembahan - Tabel kriteria pada hasil analisis data dipindahkan pada Pembahasan - Pembahasan lebih dikembangkan lagi terkait sebab akibat dari kriteria tsb <p>Bimbingan TA 2 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penambahan sambaran umum - Penambahan Lampiran terkait data LRA selama 3 tahun - Acc Tugas Akhir 	

- Catatan :**
1. Harus Selalu Dibawa Saat Bimbingan dengan Dosen Pembimbing
 2. Bimbingan Minimal 12 kali sampai Disetujui Untuk Tugas Akhir (TA)
 3. Dilampirkan Pada Saat Penjilidan Tugas Akhir (TA)

Lampiran 8 Buku Bimbingan Tugas Akhir Dosen Pembimbing II

No	Hari / Tanggal	Substansi / Uraian Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing II
	Kamis 8 / 4 - 2021 10/4	BIMBINGAN PROPOSAL 1 : - Penulisan kutipan - Tinjauan pustaka masih terlalu sedikit - Rata kanan - kiri - Tunjukkan jurnal yang menjadi rujukan - Penelitian Terdahulu kelom permasalahan + tujuan dibapus	 
	Senin 19 / 4 - 2021	Bimbingan ke 2 ACC proposal TA	
	Kamis 10 / 6 - 2021 15/6 - 2021	Bimbingan TA 1 : - Gambar kerangka berpikir baik ke hal sebelumnya - 2.5 dianalisis ke hal sebelumnya - contoh data kualitatif berupa ... - Pembahasan tambahkan keterangan	 
	17/6 - 2021 - Rabu 23 / 2021 6	Bimbingan TA 2 : Lampiran ACC TUGAS AKHIR	 

- Catatan :**
1. Harus Selalu Dibawa Saat Bimbingan dengan Dosen Pembimbing
 2. Bimbingan Minimal 12 kali sampai Disetujui Untuk Tugas Akhir (TA)
 3. Dilampirkan Pada Saat Penjilidan Tugas Akhir (TA)